

ANALISIS BELANJA DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA TAHUN ANGGARAN 2012-2014

ANALYSIS OF REGIONAL EXPENDITURE IN MINAHASA LOCAL GOVERNMENT FISCAL YEAR 2012-2014

Oleh:

Indra Christian Lontaan¹

Sonny Pangerapan²

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado

Email: ¹indra.rjl@gmail.com

²meiti_poli@yahoo.com

Abstrak: Pemerintah diberikan kewenangan untuk mengelola secara lebih luas anggaran pendapatan dan belanja daerah. Belanja daerah adalah kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Provinsi atau Kabupaten/Kota. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui efisiensi belanja dan pertumbuhan belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Objek Penelitian pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah Kabupaten Minahasa. Hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, dapat dilihat mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Minahasa terjadi efisiensi penggunaan anggaran dan Pemerintah Kabupaten Minahasa mengalami pertumbuhan belanja dari tahun 2012 sampai tahun 2014. Pimpinan Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dalam penyusunan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi, agar anggaran yang sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.

Kata kunci : belanja daerah. efisiensi, pertumbuhan belanja

Abstract: The Government was given the authority to manage the broader regional budget. Regional expenditure is the liability of the area was recognized as a reduction in the net asset value in the period of the corresponding budget year. Regional expenditure used in order to fund the implementation of the government affairs under the authority of the province or district. The purpose of this research is to know the efficiency of expenditure and the expenditure growth of government expenditure Minahasa district. The research method used is a descriptive. The object of research on Financial Management Agency and Regional Property of Minahasa District. The results of the calculation of the ratio of the efficiency of expenditure, it can be seen starting 2012 until the year 2014 Minahasa District Government efficient use of the budget and Minahasa District Government expenditure was growth from 2012 to 2014. Leader of Financial Management Board and Regional Property of Minahasa District in the preparation of the budget, should pay attention to the circumstances, so that the budget that has been prepared can be realized well.

Keywords : regional expenditure, efficiency, growth of expenditure

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia mengacu pada Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. Halim (2013:229) kewenangan otonomi yang luas mewajibkan pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat secara demokratis, adil, merata, dan berkesinambungan. Daerah memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kepada publik. Kewajiban-kewajiban tersebut dapat berupa pembangunan berbagai fasilitas publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut diperlukan pengeluaran-pengeluaran daerah. Pengeluaran-pengeluaran daerah tersebut mempunyai kaitan terhadap kewajiban-kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang.

Anggaran pendapatan pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyusunan APBD, dimana dalam penyusunan anggaran pendapatan mempunyai arti penting bagi pemerintah daerah dalam membantu kelancaran roda pembangunan dan memberikan isi dan arti kepada tanggung jawab pemerintah daerah khususnya sehingga tercipta perencanaan dan pelaksanaan yang efektif. Penyusunan anggaran pendapatan adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang seluruh kegiatan pemerintah atau instansi yang dinyatakan dalam unit moneter (nilai uang) untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang.

Belanja daerah merupakan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Zebua (2014) belanja daerah yang teralokasi secara tepat ke pos-pos belanja yang dibutuhkan oleh masyarakat akan mendorong pertumbuhan yang positif dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Analisis belanja daerah dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah daerah telah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) secara ekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi (2010:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat efisiensi belanja daerah yang dilakukan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.
2. Bagaimana pertumbuhan belanja daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa untuk tahun anggaran 2012-2014.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi pada dasarnya akan menghasilkan informasi dari sebuah sistem akuntansi yang ada di dalam sebuah entitas atau organisasi bisnis yang disebut dengan informasi akuntansi yang akan dimanfaatkan oleh pengguna seperti masyarakat umum, masyarakat intelektual (termasuk di dalamnya mahasiswa atau peneliti) dan para pengambil keputusan bisnis dalam organisasi (Pontoh, 2013:2).

Akuntansi Sektor Publik

Suatu proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan memakai ekonomi (keuangan) dari suatu organisasi atau entitas publik seperti pemerintah, LSM, dan lain-lain yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka mengambil keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan (*American Accounting Association*, 1966 dalam Halim dan Kusufi, 2014:2).

Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Mahmudi (2010:165) Pemerintah Daerah yang juga merupakan suatu organisasi sektor publik juga memiliki tujuan tertentu dalam menyajikan laporan keuangan. Adapun secara garis besar tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

1. Untuk memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik;
2. Untuk alat akuntabilitas publik;

Untuk memberikan informasi yang digunakan dalam mengevaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, maka penyajian laporan keuangan pemerintah daerah harus tepat waktu dan dapat diandalkan. Tujuan akuntansi sektor publik di Indonesia adalah untuk menciptakan Transparansi, Akuntabilitas Publik, Efisiensi, Efektivitas, dan Ekonomis.

Efisiensi

Nordiawan dan Ayuningtyas, (2010 : 161) mengidentifikasikan efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktifitas dengan sumberdaya (input) yang digunakan. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efisien apabila mampu menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efisiensi adalah hubungan antara barang dan jasa (output) yang dihasilkan sebuah kegiatan atau aktivitas dengan sumber daya (input) yang digunakan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya dengan percuma.

Anggaran

Anggaran adalah rencana kegiatan yang diwujudkan dalam bentuk finansial, meliputi usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk suatu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (dalam Halim, 2014:47).

Belanja Daerah

Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 belanja daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Berdasarkan SAP (PP No. 71 Tahun 2010), belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja) dan fungsi. Penjelasan lebih lanjut untuk setiap klasifikasi diuraikan sebagai berikut:

1. **Klasifikasi Ekonomi**
Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas, klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan tak terduga.
2. **Klasifikasi menurut Organisasi Publik**
Klasifikasi menurut organisasi publik yaitu klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Hal ini berarti bahwa belanja daerah disusun berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertindak sebagai pusat pertanggungjawaban uang/barang.
3. **Klasifikasi Fungsi**
Klasifikasi menurut fungsi adalah klasifikasi yang didasarkan pada fungsi-fungsi utama pemerintah pusat/daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian manajemen untuk mengukur efektivitas dan efisiensi belanja suatu daerah. Mahsun *et al*, (2011:96) menyatakan bahwa klasifikasi belanja daerah dapat didasarkan atas urusan pemerintahan dan program atau kegiatan. Permendagri No 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah diungkapkan pengertian

belanja daerah yaitu belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Analisis Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yang terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember (Pemendagri No. 37 Tahun 2014). Analisis belanja daerah sangat penting dilakukan untuk mengevaluasi apakah pemerintah telah menggunakan APBD secara seekonomis, efisien dan efektif. Mahmudi (2010:156) menyatakan bahwa analisis belanja daerah digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah daerah telah melakukan efisiensi anggaran, menghindari pengeluaran yang tidak perlu dan pengeluaran yang tidak tepat sasaran.

Penelitian Terdahulu

Kainde (2012), dengan judul Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung, tujuannya untuk mengetahui nilai varians dan pertumbuhan belanja antara tahun 2009-2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil dari penelitian diketahui terdapat selisih negatif antara Realisasi Belanja dan Anggaran Belanja Daerah. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya yaitu metode penelitian deskriptif. Perbedaannya pada objek penelitian. Bachmid (2012) Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Manado, tujuannya untuk menganalisis apakah Pendapatan dan Belanja Kota Manado telah terlaksanakan secara efisien dan efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian yang dilakukan yaitu dibandingkan tahun 2007-2010 tidak terjadi kenaikan atau penurunan yang besar pada realisasi belanja disebabkan tidak terjadi program atau kegiatan yang mempengaruhi anggaran belanja daerah. Terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan. Persamaannya adalah sama-sama menganalisis belanja daerah. Perbedaannya pada objek penelitian.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah bersifat deskriptif, untuk mengetahui Analisis Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Minahasa dengan menggunakan Rasio Efisiensi Belanja dan Pertumbuhan Belanja.

Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Minahasa di Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) pada bulan Desember 2015.

Prosedur Penelitian

Prosedur atau langkah-langkah penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan rumusan masalah;
- b. Mengumpulkan teori-teori yang berhubungan dengan kajian yang berhubungan dengan belanja daerah;
- c. Mengumpulkan informasi mengenai gambaran umum instansi dan mengenai laporan keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa;
- d. Mencari data yang akan digunakan dalam penelitian;
- e. Memberikan kesimpulan dan saran sehingga dapat menjadi masukan bagi pihak pemerintah.

Metode Analisis

1. Analisis Rasio Efisiensi Belanja

Mahmudi (2010:152) Rasio efisiensi belanja merupakan perbandingan antara realisasi belanja dengan anggaran belanja. Rasio efisiensi belanja ini digunakan untuk mengukur tingkat penghematan anggaran yang dilakukan pemerintah. Angka yang dihasilkan dari rasio efisiensi ini tidak bersifat absolut tetapi relatif, artinya tidak ada standar baku yang dianggap baik untuk rasio ini. Pemerintah daerah dinilai telah melakukan efisiensi

anggaran jika rasio efisiensinya kurang dari 100%, sebaliknya jika lebih maka mengidentifikasi telah terjadi pemborosan anggaran. Mahmudi (2010:152) Rasio efisiensi belanja dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\%$$

2. Analisis Pertumbuhan Belanja

Mahmudi (2010:142) analisis pertumbuhan belanja bermanfaat untuk mengetahui perkembangan belanja dari tahun ke tahun. Pada umumnya belanja memiliki kecenderungan untuk selalu naik. Alasan kenaikan belanja

biasanya dikaitkan dengan penyesuaian terhadap inflasi, perubahan kurs rupiah, perubahan jumlah cakupan layanan, dan penyesuaian faktor makro ekonomi. Namun demikian dengan paradigma baru otonomi daerah, pemerintah daerah harus dapat mengendalikan belanja daerah, melakukan efisiensi belanja dan penghematan anggaran. Mahmudi (2010:142) pertumbuhan belanja daerah dapat dihitung dengan rumus berikut :

$$\text{Pertumbuhan Belanja Tahun } n = \frac{\text{Realisasi Belanja Tahun } n - \text{Realisasi Belanja } n - 1}{\text{Realisasi Belanja tahun } n - 1} \times 100\%$$

Data dianalisis didasarkan laporan realisasi Pemerintah Kabupaten Minahasa dalam hal ini laporan belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, dalam hal ini peneliti membuat ringkasan mengenai laporan belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk tahun 2012-2014 kemudian menggunakan rasio perhitungan pertumbuhan belanja tahun 2012-2014 dan rasio efisiensi belanja. Setelah hasil perhitungan diketahui, peneliti membuat analisis berdasarkan hasil perhitungan tersebut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian Analisis Efisiensi Belanja

Tabel 1. Data Realisasi Tahun 2012 S/D 2014

NO	URAIAN	TAHUN 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014	
		ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI	ANGGARAN	REALISASI
	Belanja	770,082,753,797	717,826,582,227	859,902,391,065	785,873,005,428	1,014,575,315,157	915,309,677,767
1	Belanja Tidak Langsung	543,399,582,166	503,555,986,750	713,839,361,802	646,903,977,749	808,384,460,447	727,427,606,876
	Belanja Pegawai	496,011,553,796	465,010,179,487	547,653,957,064	498,979,826,851	607,562,734,774	557,940,803,778
	Belanja Barang	-	-	131,163,646,368	116,710,022,021	161,763,486,228	135,392,179,158
	Belanja Hibah	25,535,606,220	19,860,000,000	13,042,094,370	11,366,012,827	9,619,475,445	6,150,021,445
	Belanja Bantuan Sosial	2,500,000,000	-	3,663,864,000	2,703,750,050	2,311,250,000	2,331,250,000
	Belanja Bantuan Keuangan ke kota dan Pemerintah Desa	17,729,614,000	17,712,999,113	16,815,550,000	16,815,550,000	25,390,014,00	25,273,352,495
	Belanja Tidak Terduga	1,622,808,150	972,808,150	1,500,000,000	328,816,000	1,737,500,000	-
2	Belanja Langsung	226,683,171,631	214,270,595,477	146,063,029,263	138,969,027,679	206,190,854,710	187,882,070,891
	Belanja pegawai	17,180,753,000	15,999,895,000	-	-	-	-
	Belanja barang dan jasa	127,296,250,521	119,236,922,588	-	-	-	-
	Belanja Modal	82,206,168,110	79,033,777,889	146,063,029,263	138,969,027,679	206,190,854,710	187,882,070,891

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah (BPKBMD) Kabupaten Minahasa

Dari Tabel 1 mengenai Realisasi Belanja dan Anggaran Belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa untuk tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 dapat dihitung rasio efisiensi belanja sebagai berikut :

1. Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2012

$$\begin{aligned} 2. \text{ Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{717,826,582,227}{770,082,753,797} \times 100\% \\ &= 93,21\% \end{aligned}$$

3. Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2013

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{785,873,005,428}{859,902,391,065} \times 100\% = 91,39\% \end{aligned}$$

4. Rasio Efisiensi Belanja Tahun 2014

$$\begin{aligned} \text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Anggaran}} \times 100\% \\ \text{Rasio Efisiensi Belanja} &= \frac{915,309,677,767}{1,014,575,315,157} \times 100\% = 90,21\% \end{aligned}$$

Tabel 2. Analisis Pertumbuhan Belanja

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2011	REALISASI TAHUN 2012	Pertumbuhan	
				Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja	665,749,019,091	717,826,582,227	52,077,563,136	7.82
	Belanja Tidak Langsung	437,093,803,686	503,555,986,750	66,462,183,064	15.21
	Belanja pegawai	402,625,292,052	465,010,179,487	62,384,887,435	15.49
	Belanja barang	-	-	-	-
	Belanja Hibah	12,999,182,250	19,860,000,000	6,860,817,750	52.78
	Belanja Bantuan Sosial	5,152,575,000	-	-5,152,575,000	-100.00
	Belanja Bantuan Keuangan ke kota dan pemerintah desa	15,678,570,384	17,712,999,113	2,034,428,729	12.98
2	Belanja Tidak Terduga	638,184,000	972,808,150	334,624,150	52.43
	Belanja Langsung	228,655,215,405	214,270,595,477	-14,384,619,928	-6.29
	Belanja pegawai	-	15,999,895,000	15,999,895,000	100.00
	Belanja barang dan jasa	99,668,598,360	119,236,922,588	19,568,324,228	19.63
	Belanja Modal	128,986,617,045	79,033,777,889	-49,952,839,156	-38.73

Sumber : Data Olahan Tahun 2011-2012

Tabel 2 menunjukkan uraian mengenai perbedaan realisasi anggaran tahun 2011 dan realisasi anggaran tahun 2012 serta menunjukkan apakah terjadi kenaikan atau penurunan realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa

Tabel 3. Analisis Pertumbuhan Belanja

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2012	REALISASI TAHUN 2013	Pertumbuhan	
				Kenaikan (Penurunan)	%
1	Belanja	717,826,582,227	785,873,005,428	68,046,423,201	9.48
	Belanja Tidak Langsung	503,555,986,750	646,903,977,749	143,347,990,999	28.47
	Belanja pegawai	465,010,179,487	498,979,826,851	33,969,647,364	7.31
	Belanja barang	-	116,710,022,021	116,710,022,021	100.00
	Belanja Hibah	19,860,000,000	11,366,012,827	-8,493,987,173	-42.77
	Belanja Bantuan Sosial	-	2,703,750,050	2,703,750,050	100.00
	Belanja Bantuan Keuangan ke kota dan pemerintah desa	17,712,999,113	16,815,550,000	-897,449,113	-5.07
	Belanja Tidak Terduga	972,808,150	328,816,000	-643,992,150	-66.20
2	Belanja Langsung	214,270,595,477	138,969,027,679	-75,301,567,798	-35.14
	Belanja pegawai	15,999,895,000	-	-15,999,895,000	-100.00
	Belanja barang dan jasa	119,236,922,588	-	-119,236,922,588	-100.00
	Belanja Modal	79,033,777,889	138,969,027,679	59,935,249,790	75.83

Sumber : Data Olahan Tahun 2012-2013

Tabel 3 menunjukkan uraian mengenai perbedaan realisasi anggaran tahun 2012 dan realisasi anggaran tahun 2013 serta menunjukkan apakah terjadi kenaikan atau penurunan realisasi anggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa.

Tabel 4. Analisis Pertumbuhan Belanja

NO	URAIAN	REALISASI TAHUN 2013	REALISASI TAHUN 2014	Pertumbuhan	
				Kenaikan (Penurunan)	%
	Belanja	785,873,005,428	915,309,677,767	129,436,672,339	16.47
1	Belanja Tidak Langsung	646,903,977,749	727,427,606,876	80,523,629,127	12.45
	Belanja pegawai	498,979,826,851	557,940,803,778	58,960,976,927	11.82
	Belanja barang	116,710,022,021	135,392,179,158	18,682,157,137	16.01
	Belanja Hibah	11,366,012,827	6,150,021,445	-5,215,991,382	-45.89
	Belanja Bantuan Sosial	2,703,750,050	2,331,250,000	-372,500,050	-13.78
	Belanja Bantuan Keuangan ke kota dan pemerintah desa	16,815,550,000	25,273,352,495	8,457,802,495	50.30
	Belanja Tidak Terduga	328,816,000	-	-328,816,000	-100.00
2	Belanja Langsung	138,969,027,679	187,882,070,891	48,913,043,212	35.20
	Belanja pegawai	-	-	-	-
	Belanja barang dan jasa	-	-	-	-
	Belanja Modal	138,969,027,679	187,882,070,891	48,913,043,212	35.20

Sumber : Data Olahan Tahun 2013-2014

Pembahasan

Perhitungan rasio efisiensi belanja dapat kita lihat terjadi efisiensi penggunaan anggaran belanja. Tahun 2012 total realisasi belanja hanya sebesar 93,21% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Tahun 2013 total realisasi belanja hanya sebesar 91,39% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Tahun 2014 total realisasi belanja hanya sebesar 90,21% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Pertumbuhan belanja daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan pertumbuhan yang ditunjukkan berdasarkan nilai nominal dari total belanja yang diperoleh setiap tahunnya yaitu pada tahun 2012 terjadi pertumbuhan belanja sebesar 7,82%, pada tahun 2013 terjadi pertumbuhan belanja sebesar 9,48% dan pada tahun 2014 terjadi pertumbuhan belanja sebesar 14,14%. Ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Minahasa dalam menyusun anggarannya mengalami pertumbuhan belanja setiap tahunnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Dari hasil perhitungan rasio efisiensi belanja, maka dapat dilihat mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Minahasa terjadi efisiensi penggunaan anggaran. Tahun 2012 total realisasi belanja hanya sebesar 93,21% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Tahun 2013 total realisasi belanja hanya sebesar 91,39% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Tahun 2014 total realisasi belanja hanya sebesar 90,21% dari total anggaran belanja yang dianggarkan pada APBD. Dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Minahasa telah efisien dalam menggunakan belanja sesuai dengan anggaran yang telah disusun berdasarkan APBD.

2. Dari hasil analisis pertumbuhan belanja Tahun Anggaran 2011/2012, Tahun Anggaran 2012/2013 dan Tahun Anggaran 2013/2014 menunjukkan adanya pertumbuhan belanja. Pada tahun 2012 pertumbuhan belanja adalah sebesar 7,82 % , tahun 2013 pertumbuhan belanja adalah sebesar 9,48 % dan tahun 2014 adalah sebesar 14,4 %.

Saran

Saran yang dapat diberikan, sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah dalam penyusunan anggaran belanja, hendaknya memperhatikan situasi dan kondisi, agar anggaran yang sudah disusun dapat direalisasikan dengan baik.
2. Untuk belanja Pemerintah Kabupaten Minahasa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 perlu dilakukan evaluasi apakah hasil dari penggunaan anggaran tersebut sudah baik atau maksimal.
3. Kiranya penelitian ini dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya agar dapat meneliti analisis belanja secara lebih rinci sehingga akan selalu ada perubahan ke arah yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bachmid, Fadilah. 2012. Analisis Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Manado. *Skripsi* (tidak di publikasikan). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Hal 70.
- Halim Abdul, Muhammad Syam Kusufi. 2014. Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul. 2013. *Manajemen Keuangan Sektor Publik, Problematika Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah)*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Kainde, Christian. 2012. Analisis Varians dan Pertumbuhan Belanja Daerah pada Pemerintah Kota Bitung. *Skripsi* (tidak di publikasikan). Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado. Hal.61.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan STIM YPKN, Yogyakarta.
- Mahsun, Mohamad, Firma Sulistiyowati, Heribertus dan A.Purwonugroho. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Ketiga. BPFE, Yogyakarta.
- Nordiawan, Deddi. Hertianti Ayuningtyas. 2010. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Kedua. Salemba Empat, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.32 tentang Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2004. Undang-Undang No.33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37. Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Jakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi Konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka, Jakarta.
- Zebua, Willman Fogati. 2014. Pengaruh Alokasi Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Kualitas Pembangunan Manusia (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011-2013). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 3, No.1*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Unisversitas Brawijaya.